

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA BUANGIN
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Muh. Sabri

NIM: 14. 16. 16. 0018

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI DESA DI DESA BUANGIN
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

Muh. Sabri

Nim: 14. 16. 16. 0018

Diuji Oleh:

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

2. Irma T, S.Kom.,M.Kom

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur**” yang ditulis oleh **Muh. Sabri**, dengan NIM **14.16.16.0018** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari rabu **6 Februari 2019** bertepatan dengan **01 Jumadil Akhir 1440 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (**S.H.**).

Palopo, 06 Maret 2019 M
29 Jumadil Akhir 1440 H

TIM PENGUJI

- 
- | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Irma T, S.Kom., M.kom | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”*** meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, Sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang di ridhoi Allah Swt, demi mewujudkan *Rahmatan Lil alamin*.

Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi s1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sabbi dan Ibunda Suhaeda yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan penulis, sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa

tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr.Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor I, Dr.RustamS,M.Hum, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Hasbi, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Dr. Muammar Arafat Yusmad SH., M.H., Wakil Dekan II Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Helmi Kamal M.HI.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing S.HI.,M.HI.
4. Pembimbing I Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Pembimbing II Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI yang senantiasa memberikan koreksi, saran dan masukan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Penguji I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Penguji II Irma T, S.Kom.,M.Kom yang telah memberikan pertayaan serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Para dosen dan pegawai di kampus IAIN Palopo yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
7. Para staf yang ada di Fakultas Syariah yang senantiasa melayani dalam mengurus segala keperluan dalam penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

10. Dan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis paparkan dalam skripsi ini kalau ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan sekian dan terimah kasih.

Palopo, Januari 2019

Penyusun

Muh. Sabri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN NOTA DINAS PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Kajian Pustaka.....	8
C. Kerangka Pikir.....	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	17
C. Sumber Data.....	18
D. Subjek Penelitian.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20

F. Teknik Analisis Data.....	21
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
1. Sejarah Desa Buangin.....	23
2. Kondisi Wilayah penduduk.....	24
3. Keadaan Sosial.....	27
4. Kondisi Kelembagaan Pemerintah Desa.....	32
5. Landasan Hukum	36
6. Masalah,Potensi dan Gagasan.....	47
B. Visi dan Misi	57
1. Visi.....	57
2. Misi.....	59
C. Hasil Penelitian.....	66
1. Tata Kelola Pemerintahan Desa Buangin Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.....	66
2. Faktor Kinerja Pendukung dan Penghambat Terciptanya Pemerintahan Yang Baik.....	69
3. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

ABSTRAK

Nama : Muh. Sabri
NIM : 14. 16. 16. 0018
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Badan Perwakilan (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi
Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu
Timur.

Kata Kunci : Peran Badan Perwakilan, Demokrasi, Desa Buangin.

Skripsi membahas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kec. Towuti kab. Luwu Timur, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pembentukan peraturan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga terciptanya demokrasi di Desa. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan demokrasi desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang mengarah kepada masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa peran BPD dalam mewujudkan demokrasi desa di desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam tinjauan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa, maka peran badan permusyawaratan desa sangat penting, agar peraturan desa yang ditetapkan benar-benar merupakan peraturan yang bersumber aspirasi masyarakat. Peran badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa buangin kecamatan towuti kabupaten luwu timur, tidak semua desa sesuai Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang baru yaitu UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksesuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman menjabat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata Desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa adalah pertautan terakhir pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari Desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.¹

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.¹ Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Gondang Purwantoro Wardoyo, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo), *Skripsi Sarjana*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010), h. 1

² *Ibid*

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa (eksekutif) dan Lembaga Musyawarah Desa (Legislatif) bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintahan Desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya memainkan peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan disekitarnya.³ Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permusyawaratan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.⁴ Pemerintah mempunyai fungsi di masyarakat sebagai pengorganisasi dan pengarah untuk hal yang berkaitan dengan kerja sama seluruh warga masyarakat.⁵ Namun, dalam menjalankan tugasnya sering terjadi permasalahan, misalnya perbedaan persepsi antara Pemerintah Desa dan BPD. Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang dihadapi masyarakat Desa saat ini belum dapat

³ Ibid, h. 3

⁴ Frangki Adi Wijaya Mokodongan, *op.cit*, h. 2.

⁵ Jamil Gunawan, dkk (editor), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 2005, h. 333.

diatasi secara tuntas. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun Desa memiliki dua sumber daya penting yaitu SDM dan SDA, tetapi kesatuan masyarakat hukum tersebut tidak mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan guna memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶

Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa berjalan lambat. Masyarakat Desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan masyarakat Desa semakin tergantung pada pihak luar Desa. Pertimbangan kesejarahan dan adaptasi serta antisipasi terhadap berbagai tuntutan perkembangan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi dasar pengembangan Desa ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan landasan sebagai arah pengembangan Desa di masa yang akan datang.⁷

Adapun kasus yang terjadi di Desa Buangin Kecamatan Towoti Kabupaten Luwu Timur yaitu kurangnya partisipasi pemerintah desa khususnya BPD dalam menangani masalah masyarakat. Kerap kali BPD sering tidak menghadiri rapat-rapat desa, selain itu jika terjadi \ di masyarakat, BPD seolah bisu dan tidak ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal itu adalah tugas dari BPD itu sendiri. Akibat dari Keterbatasan kemampuan pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya juga mengakibatkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

⁶ Indra J. Piliang. dkk (editor), *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa), 2003, h.13.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berinisiatif melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan demokrasi desa?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan demokrasi desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan memperluas kajian ilmu pengetahuan khususnya tentang demokrasi, serta sebagai kajian untuk menilai peran BPD dalam mewujudkan demokrasi desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai saran untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang peran BPD dan demokrasi desa. Mahasiswa diharapkan mengetahui tentang bagaimana peran BPD dalam mewujudkan demokrasi desa.

E. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Untuk lebih memudahkan pembaca dan memberi arah lebih jelas bagi peneliti dalam memahami judul tersebut maka peneliti akan memberi defenisi operasional sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah badan yang bertugas dalam pemerintahan desa yang berperan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa.

3. Demokrasi Desa

Demokrasi desa adalah melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, musyawarah desa dan pemilihan kepala desa serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan demokrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gondang Purwantoro Wardoyo tahun 2010 dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BPD Desa Batusari dalam tugasnya menampung aspirasi masyarakat, telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara Pemerintah Desa dan BPD. Dalam bidang pengawasan BPD Desa Batusari mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDES, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miskawati tahun 2014 dengan judul Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam

¹ Gondang Purwanto Wardoyo, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo), *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010), h.7

3. melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Purwohadi Mulyono tahun 2014 dengan judul Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian ini adalah Konsistensi pengembangan Desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan Desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, keberhasilan pengembangan Desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah supradesa dan pemerintah Desa, serta segenap komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. Secara khusus, tingkat keberhasilan pencapaian target (kualitatif dan kuantitatif) yang ditetapkan, lebih banyak tergantung pada input dari berbagai aspek untuk pengembangan otonomi Desa berdasarkan regulasi terbaru.³

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitian. Sedangkan persamaan dari penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas masalah tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap desanya dan seberapa besar peran yang telah dilakukan.

² Miskawati, Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu), *Skripsi Sarjana*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), 2014, h.

³ Sutrisno Purwohadi Mulyono, Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 3 Juli 2014,.

B. Kajian Pustaka

1. Demokrasi dan Pemerintahan Desa

a. Pengertian Demokrasi

Kita mengenal istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. (kata Yunani Demos berarti rakyat, Kratos/Kratein berarti kekuasaan atau berkuasa).⁴ Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Joseph Schumpeter sebagai pencetus teori demokrasi prosedural dan menyebutnya dengan metode demokratis, mengemukakan demokrasi sebagai prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.⁵ Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter, demokrasi merupakan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.⁶

Diamond, Linz dan Lipset mendefinisikan demokrasi sebagai "Suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: **kompetisi** yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai

⁴Gondang Purwantoro Wardoyo, *op.cit*, h. 17

⁵M. Fachri Adnan, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Pada Era Demokratisasi, *Jurnal Demokrasi* Vol. IV No.1 Th. 2005, h.66

⁶Dwi Arif Wibowo, *Teori-Teori Demokrasi*, <https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, (diakses pada 19 April 2018).

politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif pada jangka waktu reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. **Partisipasi** politik yang melibatkan sebanyak mungkin warganegara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan. Tingkat **kebebasan** sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung kedalam organisasi”.⁷

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.⁸

Demokrasi, pada hakekatnya merupakan sebuah sistem atau cara canggih untuk mengelolah berbagai konflik yang ada dalam masyarakat. Demokrasi mengelolah kepentingan orang banyak, lewat mekanisme yang disepakati bersama dengan selalu mengedepankan prinsip "*check and balance*".⁹ Menurut Hatta dalam buku yang berjudul 'Demokrasi Kita', ada lima anasir demokrasi Indonesia, yakni rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja.¹⁰ Adapun prinsip-prinsip dari demokrasi yaitu:

⁷ M. Fachri Adnan, *op.cit*, h. 66

⁸ Wikipedia, *Demokrasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, (diakses pada 19 April 2018).

⁹ M Alfian Alfian M, *Mahalnya Harga Demokrasi*, (Jakarta: Intrans, 2001), h. 223.

¹⁰ Save Dagun, dkk, *Demokrasi Dalam Tajuk*, (Jakarta: Institut Ecata – INPI Pact, 1997), h. 31.

- 1) Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia
- 2) Supremasi Hukum
- 3) Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab
- 4) Kebebasan *Pers*
- 5) Pemisahan antara Negara dan Agama
- 6) Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme *Cheks and Balance*
- 7) Supremasi Sipil terhadap Militer
- 8) Prinsip Kesukarela
- 9) Prinsip Subsidiaritas¹¹

b. Pemerintahan Desa

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹² Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formil dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya.¹³

¹¹ Gondang Purwantoro Wardoyo, *op.cit*, h. 18

¹² Wikipedia, *Pemerintah Desa*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah Desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa), (diakses pada 19 April 2018).

¹³ Gondang Purwantoro Wardoyo, *op.cit*, h. 30.

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya yang dimaksud Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.¹⁴ Dalam organisasi pemerintahan desa bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara unsur pemerintahan dengan dibantu seperangkat pamong desa. Serta ditambah dengan keberadaan BPD yang merupakan mitra bagi pemerintah. Organisasi pemerintah tersebut, merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat.¹⁵

Adapun susunan organisasi desa menurut Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
- 2) Perangkat desa terdiri dari staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah
- 3) Struktur organisasi desa adalah merupakan lampiran peraturan daerah dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah tersebut.¹⁶

Demokratisasi desa adalah suatu pemerintahan dimana warga masyarakatnya ikut berpartisipasi di dalamnya. Pemerintahan tanpa adanya dukungan dari warga masyarakatnya tidak akan dapat berjalan lancar, begitu pula sebaliknya warga masyarakat tanpa pemerintahan maka kehidupan warga masyarakat tidak akan teratur dengan baik.¹⁷ Demokrasi dalam sistem pemerintahan desa adalah sistem yang diatur dengan aturan yang dibuat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan dimana rakyat ikut menjalankan suatu pemerintahan yang diwakili

¹⁴ *Ibid*, h. 32

¹⁵ Maria Herningtyas, Peran badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan desa di desa grogol kecamatan grogol kabupaten sukoharjo, *skripsi sarjana*, (Surakarta: universitas sebelas maret 2006), h. 20.

¹⁶ *Ibid*, h. 21.

¹⁷ Gondang Purwantoro Wardoyo, *op.cit*, h. 34.

oleh BPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPD berkedudukan sejajar dengan mitra pemerintah desa.¹⁸

Signifikansi atau nilai penting demokratisasi Desa dilatar belakangi oleh dua hal. **Pertama**, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa. **Kedua** terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh Undang Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.¹⁹

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut:

- 1) Hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama.
- 2) Hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi.
- 3) Pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya Desa yang khas.

¹⁸ Maria Herningtyas, *op.cit*, h. 27

¹⁹ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 9.

- 4) Solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik.²⁰

Adapun prinsip-prinsip demokrasi desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Masyarakat Desa
- 2) Musyawarah
- 3) Partisipasi
- 4) Sukarela
- 5) Toleransi
- 6) Prikemanusiaan atau humanis
- 7) Berkeadilan gender
- 8) Transparan dan akuntabel²¹

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian BPD

Menurut Rozali Abdullah bahwa Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²² Dalam kamus hukum pengertian Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan desa adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²³

²⁰ *Ibid*, h.12.

²¹ *Ibid*, h.17.

²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 170.

²³ M. Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 80.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.²⁴

b. Peran dan Fungsi BPD

Adapun peran BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Bersama dengan kepala desa menerapkan peraturan desa
- 2) Menyelenggarakan pemilihan kepala desa
- 3) Bersama kepala desa melakukan pengangkatan dan pemberhentian pamong desa
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
- 6) Membentuk panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pamong desa.²⁵

Fungsi BPD Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.²⁶

²⁴ Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa, (diakses pada 19 April 2018).

²⁵ Maria Herningtyas, *op.cit*, h. 29.

²⁶ Gondang Purwantoro Wardoyo, *op.cit*, h. 39.

c. Hak dan Kewajiban BPD

1) Hak BPD

Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 pasal 37 ayat 1, anggota BPD mempunyai hak :

- a) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan pendapat;
- d) Memilih dan dipilih;
- e) Memperoleh tunjangan;²⁷

2) Kewajiban BPD

Menurut pasal 37 ayat 1 PP RI No. 72 Tahun 2005, anggota-anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;
- e) Memproses pemilihan kepala desa;
- f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- h) Peran BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 38.

²⁸ *Ibid*, h. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan empiris yang mengarah kepada masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa peran BPD dalam mewujudkan demokrasi desa di desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai peran BPD dalam mewujudkan demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Alasan memilih lokasi tersebut karena penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mewujudkan demokrasi desa yang dilakukan oleh Badan Perwakilan
Desa

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu mewawancarai informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan, selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi, sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Peneliti juga menggunakan dokumentasi, yaitu okumen-dokumen yang menjadi sumber data, sedang isi catatan adalah objek penelitian atau variable penelitian.¹

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan secara terstruktur yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian penulis. Agar data primer ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, maka diperlukan sumber data dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan.

¹Suharsani Arikuntu, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dari kegiatan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur seperti letak geografis, keadaan gedung serta berbagai referensi, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Data sekunder merupakan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan penelitian secara langsung. Data ini berupa dokumentasi penting menyangkut profil masyarakat, dokumen kegiatan, petunjuk teknis kegiatan upacara adat bunga lalan panggarapan sawah sebagai bentuk kearifan lokal serta aliran kepercayaan lainnya serta solusi yang harus diberikan kepada masyarakat.

D. Subjek Penelitian

Subjek adalah keseluruhan objek penelitian. Pada tahun 1998 Nana Sudjana mendefinisikan subjek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan lain-lain.²Jadi subjek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah tokoh masyarakat, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan.

²Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 81.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi yang dilaksanakan secara langsung, observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek diselidiki.³

Adapun observasi yang digunakan ialah mengamati kegiatan mendemokrasikan desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data dari subjek penelitian yaitu dari masyarakat yang ada di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam mengikuti kegiatan Peran Badan Perwakilan Desa dalam mewujudkan demokrasi desa.

³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet. III; Surabaya: SIC, 2010),h. 96.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴ Mengenai dokumentasi yang digunakan ialah baik itu dokumentasi mengenai data-data peran Badan Perwakilan Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dan lain-lainnya yang berhubungan dengan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis/Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data
2. Displan Data
3. Conclusion Data

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet 13; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasikan di gambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Buangin

Desa Buangin merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Garkin Dusun Mandula dan Dusun Lamonto serta satu Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT SP 4 Buangin).dengan Jumlah RT terdiri dari 8 RT ¹.

Berikut ini gambaran tentang sejarah perkembangan Desa:

Tahun 1950–1953 : Bapak P.Sakko

Tahun 1953 – 1954 : Bapak Lahemma

Tahun 1954 – 1956 : Bapak Barumbu

Tahun 1956 – 1957 : Bapak LaHemma

Tahun 1958 – 1961 : Bapak La Huseng

Tahun 1961 – 1963 : Bapak Teppo.

Tahun 1963 – 1990 : Bapak Abdul Basir.

Tahun 1990 – 2000 : Bapak Abd Rahman

Tahun 2000 – 2002 : Bapak Abd Majid (pejabat sementara)

¹ Sumber Data ; Buku Pedoman, Dokumentasi, Profil Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2002 – 2007 : Bapak AGUS .SE

Tahun 2007 : Kekosongan Pejabat Kepala Desa di isi Bapak Muhajar Muchlis (Sekdes) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Mahalona

Tahun 2008 : Bapak AGUS. SE sampai tahun 2014 berdasarkan hasil pemilihan kepala Desa Mahalona

Tahun 2009 : Pembukaan UPT Garkim dan SP 3 Transmigrasi Mahalona

Tahun 2011 : Pembukaan SP 3 Transmigrasi Mahalona

Tahun 2015 : Bapak Rahmat,S.Sos. Selaku Plt Kepala Desa Buangin Mengundurkan diri. Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa berdasarkan SK dari kabupaten maka diangkatlah Bapak Hamka Ahmad,S.KM menjabat Plt.

Tahun 2016 : Bapak Rahmat, S.Sos Ini merupakan awal dari pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Desa Buangin sebagai Desa Depinitif, dimana diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) yang pertama kali di Desa Buangin, Kemudian Melakukan Perekrutan Aparat Desa untuk melengkapi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Buangin.

2. Kondisi Wilayah dan Penduduk

Penduduk Desa Buangin berjumlah 1.341 jiwa yang terdiri dari laki – laki 674 jiwa dan perempuan 667 jiwa dengan registrasi penduduk ada dan teratur.

Jumlah kepala Keluarga 348 KK dan diantaranya merupakan keluarga miskin 129 KK/366 Jiwa.

Di bawah ini Tabel 1 memperlihatkan wilayah dari 3 Dusun yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Buangin.

Tabel 1. Data Dasar Penduduk KK, Jenis Kelamin dan Status, Desa Buangin., Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan 2016

No	Dusun	KK	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total Penduduk (Jiwa)	Status (Jiwa)	
						Miskin (M)	Non Miskin (NM)
1	Dusun Garkim	150	337	306	643	141	502
2	Dusun Mandula	128	243	222	465	126	349
3	Dusun Lamonto	66	167	147	315	69	246
	Total	334	717	675	1.313	226	1.097

Sumber : Data Primer 2016

Tabel tersebut diatas memperlihatkan data jumlah KK tiap Dusun, dengan total jumlah penduduk dan keluarga miskin dan non miskin.

Hasil Rekapitulasi Data Dasar Penduduk Berdasarkan Pekerjaan dan Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2 dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. Data Dasar Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Desa Buangin, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan

No	Dusun	Pekerjaan (orang)		
		Bertani/Berkebun	PNS	Pelajar
1	Dusun Garkim	172	1	216
2	Dusun Mandula	201	1	120
3	Dusun Lamonto	103	1	60
	Total	476	3	398

Sumber : Data Primer, 2016

Data di atas dapat menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan Desa Buangin, Kecamatan Towuti ,Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan 2016. Yang mana data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian/Perkebunan sebanyak 476 orang, PNS 3 orang sementara pelajar berjumlah 398 orang.

Sarana yang terdapat di Desa Buangin yang dipergunakan oleh masyarakat saat ini sangat terbatas. Adapun fasilitas atau sarana yang dimiliki sebagai berikut :

1. Lapangan sepak bola 2 unit, lapangan volley sebanyak 1 unit.
2. Sarana jamban yaitu : jamban 10 unit dan masih ada beberapa lagi jembatan yang harus dibangun.
3. Tempat beribadah berjumlah 1 unit Mesjid dan Mushallah 5 unit

4. Sekolah SD berjumlah 2 unit (permanen) dan TK 2 unit (Yayasan)

Berdasarkan jumlah masyarakat yang banyak dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan masyarakat terbatas, sehingga perlu ditingkatkan.

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Potensi sumber daya manusia Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Sangat perlu ada Perhatian khusus terkait dengan SDM jika dibandingkan dengan beberapa Desa yang ada di Kecamatan Towuti dan bahkan di seluruh kabupaten Luwu Timur, dengan tingkat pendidikan Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Data Dasar Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Buangin Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan yaitu : Total jumlah penduduk yang tersebar di 1.341 Jiwa yang terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, Desa Buangin ini dapat diurai yaitu : yang tidak sekolah (TS) sebesar 3 jiwa, yang belum sekolah (BS) berjumlah 424 jiwa yang akan masuk usia TK, yang berpendidikan SD 694 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 208 jiwa, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 150 jiwa, Diploma Tiga (D3) berjumlah 3 jiwa dan Strata Satu (S1) sebanyak 12 orang. Master (S2) sebanyak 0 Orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Keberadaan sekolah SD sampai SMA/Sederajat di Desa Buangin berdasarkan Kelas, Guru dan Murid serta Ratio antara Murid dengan Guru.

Nama Sekolah	Kelas	Guru				Murid		Ratio Terhadap Murid dan Guru
		PNS		Honor				
		L	P	L	P	L	P	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
SDN 267 Lampesue SP.III Buangin/Garkim		3		2	6	104	102	5.34/

Sumber : Data Primer 2016

b. Kesehatan

Kondisi Desa Buangin saat sekarang mempunyai tenaga kesehatan 2 orang (bidan desa) dengan status PNS dan PTT, Tugas sehari-harinya melayani kesehatan masyarakat. Melihat dari jumlah penduduk yang berjumlah kurang lebih 1.341 jiwa sangat tidak seimbang dari jumlah penduduk dan tenaga kesehatan yang ada.

Kegiatan imunisasi BCG, Campak dan Polio sudah mulai berjalan di Desa oleh tenaga medis dan Kader desa, namun belum berjalan optimum karena terbatasnya tenaga yang tersedia dan Fasilitas Kesehatan khususnya di tingkat Dusun.

d. Agama

Banyaknya penduduk berdasarkan Agama dari hasil data dasar Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi selatan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5. Data Dasar Penduduk Berdasarkan Agama Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2016.

No	Dusun	Total Penduduk (Jiwa)	Agama (orang)		
			Islam	Kristen	Hindu
1	Dusun Garkim	643	622	23	0
2	Dusun Mandula	128	454	11	0
3	Dusun Lamonto	66	311	3	0
	Total	334	1.387	37	0

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan jumlah masyarakat yang beragama Islam dan Kristen perdusun, yang mana Desa Buangin ini memiliki 3 dusun. Tabel tersebut terlihat bahwa jumlah masyarakat jauh lebih besar yang beragama Islam bila dibandingkan yang beragama Kristen. Adapun jumlah masyarakat yang beragama Islam sebesar **1.3487** orang sedangkan Kristen **37** orang, bila

dipresentasikan dari total jumlah penduduk warga yang beragama Islam 99.6 persen dan yang beragama Keristen 0.4 persen.

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Buangin masih sangat rendah karena dilihat dari jumlah penduduk sekitar **1.392** jiwa masih terdapat **222** keluarga miskin. Hal ini disebabkan karena dari jumlah penduduk Desa Buangin adalah merupakan Transmigrasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sangat minim, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat belum maksimal hasilnya, begitu pula dengan usaha-usaha lainnya seperti peternakan, pertukangan dan perdagangan

Melihat dari variasi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya berdasarkan pekerjaan kepala keluarga berdasarkan usaha bidang pertanian perkebunan sebanyak 239 KK, peternakan 7 KK, pertukangan 3 KK dan servis elektronik 0 KK.

Keadaan ekonomi yang ada di Desa menunjukkan bahwa potensi usaha dagang hasil bumi berjumlah 2 unit, usaha dagang campuran skala rumah tangga berjumlah 22 unit yang tersebar di 3 dusun dan usaha pertukangan berjumlah 2 unit. Dari semua usaha ekonomi ini merupakan sumber daya yang dapat menunjang ekonomi masyarakat secara umum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya keluarganya sehari-hari.

4. Kondisi Kelembagaan Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Buangin yang memiliki luas 2.456.43 Km² terbagi atas 3 Dusun yakni: Dusun Garkim, Dusun Mandula, Dusun Lamonto, Serta memiliki 8 RT. Sedangkan Jarak ibu kota Kecamatan \pm 25 Km dan ibu kota Kabupaten \pm 75 km serta jarak dari ibu kota Propinsi \pm 675 Km dengan ketinggian antara 354 M diatas permukaan laut.

Secara geografis wilayah Desa Buangin berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Desa Mahalona
- b. Sebelah Timur : Berbatasan Desa Mahalona
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Desa Libukan Mandiri
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Desa Tole

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa Buangin terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Staf, Kepala Dusun/Kepala Kewilayahan dan RT serta Ketua BPD dan anggota- anggotanya. Yang akan melaksanakan roda pemerintahan Desa Buangin berdasarkan tugas dan fungsinya masing- masing. Untuk lebih jelasnya dibawah ini beberapa uraian tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,

penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga-kerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,

dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selain itu perlu kita ketahui keberadaan kelembagaan Desa BPD, Pemuda, LKMD menurut tingkat perkembangannya dalam kategori persiapan.

5. Landasan Hukum

Tujuan pemberian otonomi daerah seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan penjabaran

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan yang demokratis, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan yang serasi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah, serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraannya NKRI menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Desa. Dengan demikian Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah pelayanan dan pembinaan kesejahteraan, demokratisasi, keadilan, dan pemerataan bagi terwujudnya kemandirian Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dalam jangka panjang, faktor penentu keberhasilan tugas yang diemban oleh Pemerintah Desa untuk mendorong keberhasilan Otonomi Daerah di Kabupaten Luwu Timur adalah sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam fungsi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, Pelayanan, Pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan yang baik

akan menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan membuahkan hasil keadilan, kesejahteraan masyarakat dan hasil akhirnya kemandirian Desa yang dicitakan akan terwujud dengan baik.

Fungsi dan peran Pemerintah Desa dalam pelayanan masyarakat, yang meliputi (pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, keamanan ketertiban dan pelayanan umum) merupakan sumber otoritas Desa di dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan infrastruktur, penyediaan sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan peran serta masyarakat berusaha, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun kedepan adalah, perlu dilakukan penyusunan sebuah program-program yang terencana, komprehensif, sistematis dan terpadu yang mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi serta demokrasi, yang tertuang dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun kedepan.

RPJMDes Desa Buangin ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan Kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan

pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2016-2021 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor RI 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309).
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);Sebagaimana telah di ubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor: 88 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 5694)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawara Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 94)

a. Pengertian

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dimaksud berikut ini :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Utara
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan DD adalah Dana yang yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN yang di Kabupaten Kota kemudian di transfer ke rekening Desa.
18. Visi Desa adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa Buangin yang diinginkan.
19. Misi Desa adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi Desa dapat terwujud secara efektif dan efisien.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Desa adalah:

1. Sebagai pedoman dan menentukan arah Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun selama masa jabatan Kepala Desa;
2. Sebagai acuan dalam menentukan pilihan-pilihan program dan kegiatan pembangunan tahunan desa.
3. Agar Pemerintah Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum

4. Sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan tahunan Desa

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM

Desa) adalah sebagai berikut :

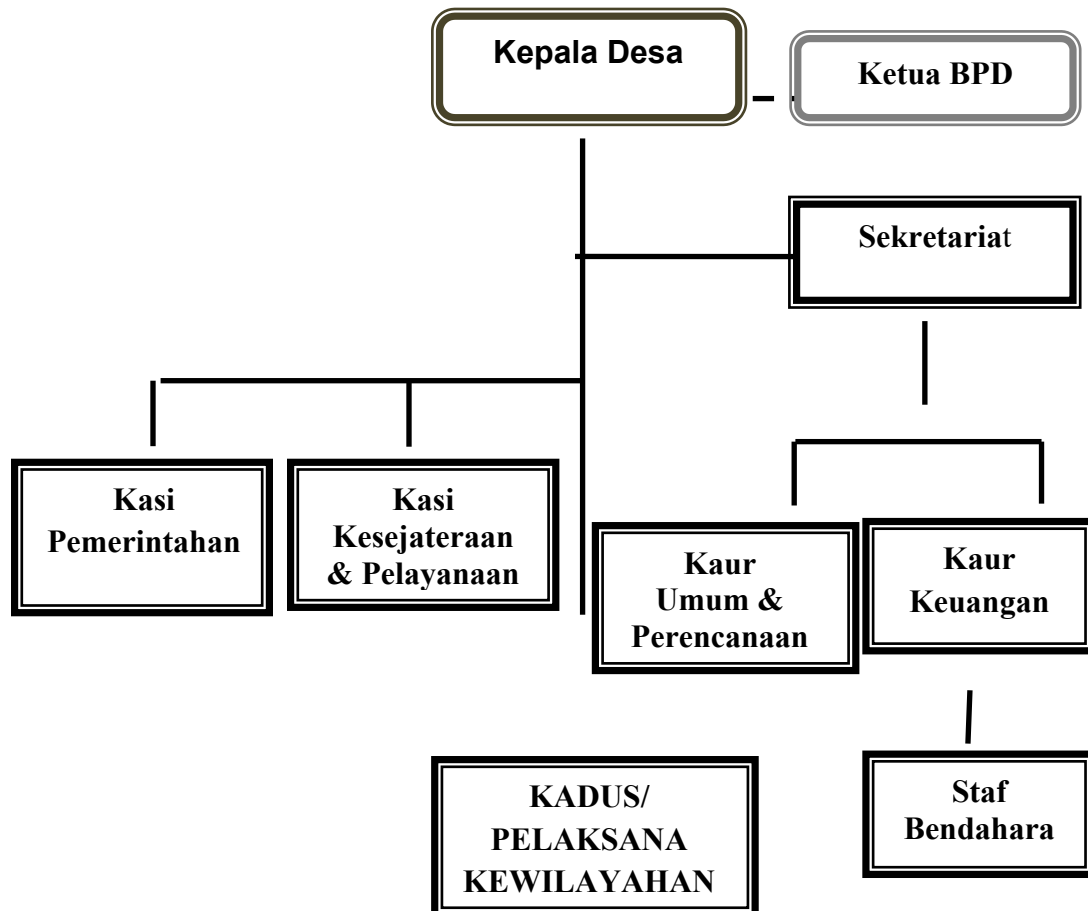
1. Menyediakan dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dan semua lembaga kemasyarakatan desa serta seluruh elemen masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan desa;
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi Kecamatan dan Kabupaten;
3. Menyelaraskan dan memadukan program dan kegiatan Pembangunan Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Desa.

c. Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

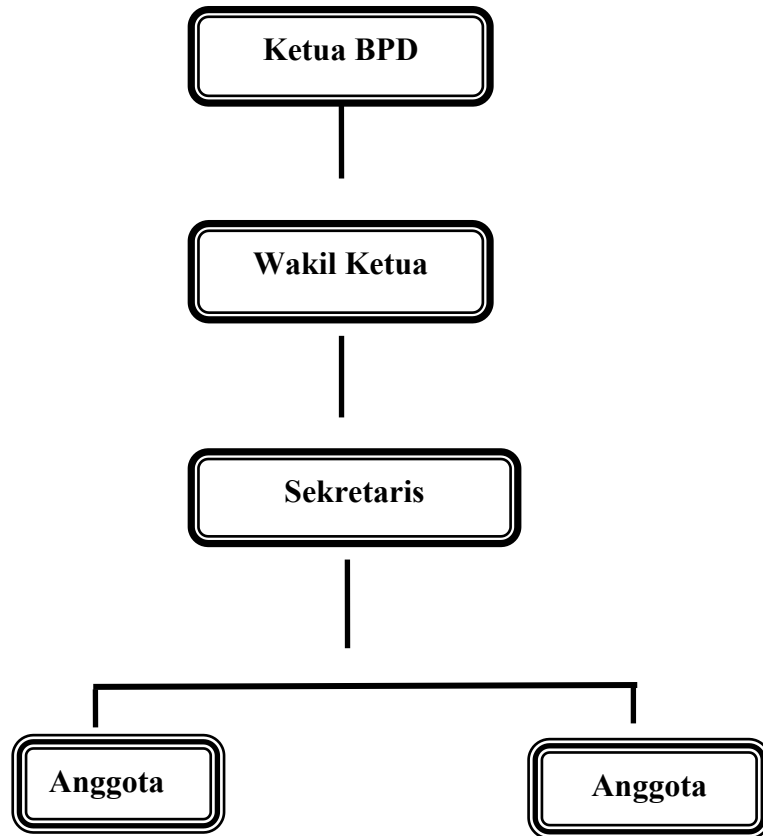
1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan Desa
2. Masyarakat dapat menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan perencanaan kegiatan pemerintah Desa
3. Masyarakat melihat dapat rencana kegiatan pembangunan Desa apakah perencanaan tersebut berpihak kepada kelompok masyarakat miskin, perempuan dan alain-lain.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Buangin. Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, 2016

Keterangan : ———— Garis komando
 ----- Garis koordinasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Buangin.,

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, 2016

Keterangan : ——— Garis komando

6. Masalah, Potensi Dan Gagasan

1. Masalah

Desa Buangin merupakan Desa yang baru terbentuk sejak tahun **2012** yang tentunya banyak masalah yang terjadi dan sangat bervariasi dari semua bidang, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk lebih jelasnya secara garis besarnya masalah yang terjadi desa sebagai berikut :

a. Masalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan Bidang pengembangan wilayah di Desa Buangin meliputi :

1. Sumber Daya Manusia yang tergolong masih sangat rendah
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
3. Data terkait dengan Propil Desa yang belum lengkap Datanya

Penetapan Tapal Batas Desa dan Peta Administarsi desa yang belum ada

4. Pengelolaan informasi Desa;
5. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
6. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
7. Fasilitas Bangunan serba Guna yang belum ada.

Berdasarkan Masalah yang berhubungan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut diatas dengan potensi yang dimiliki di Desa Buangin maka pemerintah Desa melakukan beberapa kebijakan dengan memprogramkan

diantaran :Pelatihan, Bimtek Aparat Desa dan BPD, Melakukan Pemuktahiran Data setiap tahunnya, Mengsosialisasikan terkait dengan Tapal Batas Desa dan Dusun, Pengadaan Buku Inventarisasi dan Papan Informasi, senantiasa melakukan Musyawarah terkait dengan Perencanaan Desa, Membuka ruang terkait dengan kegiatan yang dapat dikerja samakan dengan desa lain.

b. Masalah Di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :

1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain:

- a) Jalan pemukiman yang sering becek dan Bergelombang sehingga ketika hujan air tergenang dijalan.
- b) jalan Poros Desa sebagai Jalan Penghubung antara Desa yang sering becek dan Bergelombang sehingga ketika hujan air tergenang dijalan.
- c) Masyarakat Kesulitan dalam hal Jaringan Listrik.
- d) lingkungan permukiman masyarakat sering tergenang Air karena saluran air yang tidak lancar yang disebabkan saluran air belum permanen sehingga mudah tertimbun tanah.
- e) Masih banyak jembatan dan Plat Duicker yang belum terbangun dan perlu pemeliharaan

3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan lain-lain
3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) Taman bacaan masyarakat;
- b) Pendidikan anak usia dini;
- c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- d) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- e) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pasar Desa;
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa dan penguatan permodalan BUM Desa
3. pembibitan tanaman pangan;
4. penggilingan padi;
5. pembukaan lahan pertanian;
6. pengelolaan Lahan Desa;
7. kolam ikan dan pembenihan ikan
8. Peternakan, Sapi, Kambing, Itik, Ayam

9. Irigasi

10. Bendungan / Dam

11. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

12. Sarana Pendukung Peningkatan dan Pengelolaan Hasil Petanian

5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan;

2. Pembersihan daerah aliran sungai;

 Berdasarkan Masalah yang berhubungan dengan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut diatas dengan potensi yang dimiliki di Desa Buangin, maka pemerintah desa melakukan beberapa kebijakan dengan memprogramkan diantaranya :

1. Senantiasa Berkoordinasi dengan PPL dan Dinas terkait
2. Senantiasa Memasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa walaupun tidak dapat terdani secara keseluruhan mengingat Dana yang sangat terbatas.
3. Memasukan dalam Anggaran yang bersumber dari Pihak ketiga
4. Membangun pasar Desa yang mempercepat pertumbuhan ekonomi

d. Masalah pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

 Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

Bedasarkan masalah yang berhubungan dengan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan maka pemerintah desa melakukan beberapa kebijakan diantaranya :

1. Memberikan Anggaran Pelaksanaan Kegiatannya yang bersumber dari APBDes
2. Memberikan Insentif kepada Linmas/Hansip yang bersumber dari APBDes
3. Membangun sarana Olah Raga.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan meliputi :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,

6. kelompok pengrajin,
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
8. kelompok pemuda;

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di atas dengan melihat potensi yang dimiliki maka pemerintah desa lebih terarah dalam membuat kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya untuk mensukseskan program pembangunan secara berkesinambungan di Desa.

2. Potensi

Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi yang cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Banyaknya potensi yang layak untuk dikembangkan secara optimal di Desa Buangin karena selain di dukung oleh letaknya secara geografis, Tanah yang subur, curah hujan merata sepanjang tahun yang termasuk tipe iklim C dan B sehingga memungkinkan warga untuk dapat lebih memaksimalkan potensi penggunaannya. Adapun topografi memiliki tanah yang datar, Berbukit yang sangat mendukung pengelolaan potensi desa disetiap sektor.

Potensi sektor pertanian dan perkebunan terutama kelapa sawit, padi, Lada, palawija/kacang-kacangan, serta tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan (rambutan, durian dan lainnya) serta potensi peternakan selain itu juga potensi lahan pertanian

yang sangat subur. Di samping Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di desa masih terjaganya nilai-nilai kegotong royong-nya dan musyawarah sehingga setiap permasalahan yang ada di desa dapat di selesaikan secara bersama – sama oleh setiap warga. Yang umumnya difasilitasi oleh tokoh masyarakat.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Desa Buangin cukup besar yang didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Potensi Sumber Daya Alam Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan 2016

No	Uraian Sumber Daya Alam	Luas (Ha)	Pesentase (%)
1	Kebun Sawit	35	
2	Kebun Merica	421	
3	Sawah	429	
	Cengkeh	200	
5	Empang air tawar	25	
	Total	= 1.075	

Sumber : Data Primer, 2016

Luas wilayah Desa Buangin. mencapai **2.456,43** Km². Dari luas wilayah tersebut tergambar dengan penggunaan seperti : Luas daerah pertanian dan

perkebunan didominasi oleh Lada/Merica dengan luas 421 Ha, Kelapa Sawit dengan luas 35 Ha, sawah 429Ha, Sungai 15 Km.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi sumber daya manusia Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur masih sangat minim, dengan tingkat pendidikan terinci pada Tabel berikut :

Tabel 7. Potensi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Data Dasar Penduduk, Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan 2016

No	Dusun	Pendidikan (orang)								Total PDDK. (jiwa)
		TS	BS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Dusun Garkim	2	20	161	34	16	1	6		240
2	Dusun Mandula	3	27	77	27	13		3		160
3	Dusun Lamonto	2	25	167	57	11		2		264
	Total	10	73	415	118	40	1	11		664

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel di atas menunjukkan Potensi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dari Data Dasar Penduduk, Desa Buangin, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa jumlah yang tidak sekolah (TS) sebanyak 10 orang, yang belum sekolah (BS) sebanyak **25** orang, Tingkat pendidikan SD sebanyak **167** orang, tingkat pendidikan SLTP **57** orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak **55** orang, tingkat pendidikan diploma tiga (D3) **1** orang, dan strata satu (S1) **16** orang dan Master sebanyak **0** orang sehingga total jumlah potensi SDM sebanyak **840** orang.

b. *Potensi Ekonomi*

Adapun potensi ekonomi Desa berdasarkan bidang usaha dengan jumlah kepala keluarga yang menggelutinya dan potensi usaha yang ada dapat terlihat dalam tabel Tabel 8 dan 9 berikut ini :

Bidang usaha Kepala keluarga berdasarkan dari jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di desa terlihat pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Tingkat Bidang Usaha dengan Jumlah KK yang ada di Desa . Buangin,

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, 2016

No	Bidang usaha	Jumlah KK
1	Pertanian / Perkebunan	239
2	Peternakan	7
3	Perikanan air Tawar	0
	Perdagangan	13
5	Pertukangan	3
6	Perbengkelan	5

Sumber : Data Primer 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa yang berusaha disektor pertanian /perkebunan sebanyak 239 KK, peternakan 7 KK, perdagangan (campuran skala rumah tangga) 13 KK,Perbengkelana 5 KK dan pertukangan sebanyak 3 KK.

Tabel 9. Potensi Ekonomi Berdasarkan Jumlah (unit) Desa Buangin.

No	POTENSI	UNIT
1	Usaha Dagang Hasil Bumi	2
2	Usaha Dagang Campuran (Skala Rumah Tangga)	11
3	Usaha Pertukangan / Somel	3

Sumber : Data Primer, 2016

Tabel tersebut di atas menunjukkan potensi ekonomi berdasarkan jumlah (unit), yang mana menunjukkan Usaha dagang hasil bumi sebanyak 2 unit, usaha

dagang campuran skala rumah tangga sebanyak 11 unit dan usaha pertukangan/somel sebanyak 3 unit

3. *Gagasan*

Pada dasarnya suatu gagasan itu ada karena adanya masalah yang dihadapi dan tersedianya potensi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Gagasan itu apakah bersumber dari kelompok masyarakat atau bersumber dari unsur masyarakat yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Dalam menentukan sebuah gagasan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah sehingga nantinya akan memunculkan sebuah gagasan yang dapat dilaksanakan dengan tersedianya berbagai macam potensi pendukung dalam melaksanakan gagasan tersebut

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah Desa/institusi. Visi sebuah Desa sangat menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa dalam menahkodai pembangunan desannya menuju masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan visi Desa Buangin dilakukan melalui sebuah mekanisme musyawarah dan mufakat dengan melibatkan seluruh unsur/atau komponen dan aparat Pemerintah Desa. Langkah ini dibangun untuk membangun komitmen bersama tentang arah atau tujuan pembangunan Desa saat ini dan masa yang akan

datang serta membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bagi seluruh komponen dalam usaha-usaha pencapaian visi.

Sebelum menetapkan visi, peserta musyawarah membahas sejumlah hal-hal yang dianggap penting untuk menghasilkan visi yang baik. Dalam hal ini ciri-ciri visi Desa yang baik berikut ini :

- a. Merupakan hasil komitmen dan bisa memberikan inspirasi bagi para pelaksana juga merupakan jembatan masa lalu dengan masa depan
- b. Memfokuskan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta manfaatnya luas
- c. Mengandung tujuan yang jelas sehingga memberikan keyakinan bagi para pelaksana juga pelaksanaannya yang bersifat fleksibel dan kreatif

Hasil musyawarah dan mufakat, aparat pemerintah Desa menghasilkan kesepakatan tentang Visi Desa Buangin adalah :

“ Terbentuknya Desa Buangin yang tentram serta senantiasa berkembang dalam sektor pertanian dan perkebunan yang akan menghasilkan penguatan ekonomi masyarakat yang santun dan berperangai”.

Visi ini mengandung makna tentang tekad warga masyarakat dan aparat Desa Buangin menuju Desa yang mandiri, sehat dan terdepan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan norma yang dimiliki sehingga terwujud masyarakat Madani yang bermartabat.

2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah institusi/desa sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi ini merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami.

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hasil musyawarah diperoleh **“Misi Desa Buangin”** sebagai penjabaran visi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor pertanian dan perkebunan melalui bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan
2. Berperan aktif dalam meningkatkan akhlak/perangai serta moraliats masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama,dan budaya
3. Senantiasa memaksimalkan pelayanan pada birokrasi dan keamanan lingkungan
4. Mervitalisasi struktur kelembagaan Desa Buangin dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas yang dianggap urgen sesuai hasil musyawarah
5. Membangun sarana penunjang peningkatan kualitas masyarakat

dibidang keamanan, pemuda dan kelompok perempuan

6. Memfasilitasi pengembangan pada bidang pendidikan untuk melahirkan putra daerah berkualitas dan mampu bersaing.

a. Program Pembangunan Desa

Berikut uraian tentang program pembangunan Desa yang akan direncanakan untuk 6 (Enam) tahun kedepan beserta yang akan dicapai dengan perencanaan program tersebut

No	Rencana Program Kegiatan	Hal-hal yang akan dicapai
1	Pengadaan/Penambahan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa	Peningkatan kesejahteraan Aparat Desa
2	Pengadaan/Penambahan Operasional Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan
3	Pengadaan/Penambahan Mobiler Kantor Desa	Peningkatan Pelayanan
4	Pembangunan Kantor Desa	Pusat Kegiatan dan Administrasi Desa
5	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor Desa	Proteksi Areal Kantor Desa
6	Pengadaan Mesin /PLTS Kantor Desa	Peningkatan Pelayanan

7	Pengadaan /Penambahan Operasional dan Tunjangan BPD	Peningkatan Kesejahteraan dan Peningkatan Pelayanan
8	Pengadaan Mobiler BPD	Peningkatan Pelayanan
9	Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa /Dusun dan Pengadaan Peta Administrasi Desa	Memperjelas Tapal Batas
10	Pengadaan/Penambahan Insentif RT	Meningkatkan Kesejahteraan RT
11	Perencanaan Pembangunan Desa	Terarahnya Pembangunan Desa
12	Pemuktahiran Profil Desa	Kelengkapan Data Profil Desa
13	Musyawarah Desa	Teragendanya Musyawarah Desa
14	Pembangunan Pintu Gerbang Desa	Memberikan Gambaran Batas Area Adm Desa
15	Pembangunan Balai Dusun Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Aparat Desa	Sarana Pertemuan Masyarakat di Tingkat Dusun

16	Pemekaran Kecamatan Buangin	Peningkatan Kesehatan
17	Pengadaan Mesin /PLTS Puskesmas Buangin	Peningkatan Pelayanan
18	Pemeliharaan Kendaraan Ambulance	Penerangan dan Memperlancar Pelayanan Kesehatan
19	Pengadaan Mobil Ambulance	Peningkatan Pelayanan
20	Pengadaan Mobil Jenazah	Peningkatan Pelayanan
21	Rehab Bangunan UGD Puskesmas Buangin	Peningkatan Pelayanan
22	Rehab Banguna Pagar Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan Pasien
23	Penambahan Tempat Tidur Ruang Inap Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan Pasien
24	Pengadaan Mobiler Puskesmas Buangin	Peningkatan Pelayanan
25	Pembangunan Selasar Puskesmas Buangin	Peningkatan Pelayanan
26	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Limbah	Agar Limbah tidak

	Puskesmas Buangin	Mengganggu Kesehatan
27	Pengadaan Printer Puskesmas Buangin	Peningkatan Pelayanan
28	Rehab Plapon Bangunan Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan dalam Ruang Inap
29	Rehab Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan Tenaga Medis yg tinggal di Rumah Dinas
30	Rehab Teras Bangunan Puskesmas Buangin	Terpeliharanya Bangunan Kesehatan
31	Pengadaan Bak Sampah Puskesmas Buangin	Menghindari Sampah di Buang disembarang Tempat
32	Pengadaan Westapel Puskesmas Buangin	Mengsterilkan Alat Medis dan Tangan Tenaga Medis
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB	Sarana Sosialisasi KB
34	Pengadaan Bak Pembakaran Sampah Puskesmas Buangin	Membakar Sampah

35	Pembangunan Taman Lansia	Peningkatan Kesehatan Lansia
36	Pengadaan Fasilitas Joging Trek Puskesmas Buangin	Sarana Pembinaan Kesehatan
37	Penataan Halaman Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan dalam Areal Puskesmas
38	Pengadaan Tempat Tidur Tindakan Ruangan UGD Puskesmas Buangin	Memberikan Kenyamanan Pasien
39	Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) Puskesmas Buangin	Memperlancar Pelayanan Kesehatan
40	Rehab/Pembangunan Septi Tenk Rumah Dinas Puskesmas Buangin	Menghindari Pembuangan tidak Mengganggu Lingkungan
41	Pengadaan Papan Informasi/Poster Iklan Sosialisasi Kesehatan	Sosialisasi /Promosi Kesehatan
42	Pengadaan Armada Pengangkut Sampah	Mengangkut Sampah
43	Pembangunan Poskesdes	Sarana Pelayanan Kesehatan

44	Pembangunan Pagar Poskesdes	Proteksi Areal Poskesdes
45	Pengadaan Mobiler Poskesdes	Peningkatan Pelayanan
46	Pembangunan Pagar Posyandu	Proteksi Areal Posyandu
47	Pengadaan Mobiler Posyandu	Peningkatan Pelayanan

b. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian dalam setiap perencanaan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa), adalah:

1. Menyusun rancangan rencana kerja pemerintah Desa setiap tahun
2. Memastikan rencana kegiatan yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa termuat dalam RKP Desa
3. Melaksanakan musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbang)
4. Menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa
5. Menyetor hasil musrenbang Desa ke kecamatan
6. Menghadiri musrenbang Kecamatan atau kabupaten
7. Membuat proposal rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen RKP Desa
8. Menyerahkan proposal rencana kegiatan kepada dinas terkait/SKPD berdasarkan sumber dana pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan yang di danai oleh pemerintah Daerah

9. Khusus untuk kegiatan yang di danai oleh pemerintah Desa, atas dasar RKP Desa dan proposal inilah yang akan di jadikan acuan dalam pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun bersangkutan.

C. Hasil Penelitian

1. Tata kelola pemerintahan Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Menurut beberapa masyarkat Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur organisasi dan kelembagaan di Desa Buangin belum berkembang sebagai mana yang terjadi di Desa-Desa berkembang. Aparat pemerintahan Desa masih membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mendukung terlaksananya roda pemerintahan yang ideal.²

Organisasi dalam pemerintahan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah terbentuk namun belum memberi kontribusi maksimal. Sedangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) belum memiliki struktur, sehingga peran organisasi ini hanya dikendalikan oleh aparat Desa. Kelembagaan masyarakat lainnya seperti Kelompok Tani, Dasawisma, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lain-lain memiliki kondisi serupa dengan organisasi diatas, yaitu belum aktif dan membutuhkan peningkatan kapasitas anggotanya melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Kerja Sama dengan baik. Dalam struktur Pemerintah

² Andi Ikhsan Masyarakat Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 17 November 2018

Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dengan unsure Pemerintah Desa bahkan mitra kerja dari Kepala Desa hal tersebut dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbang kekuasaan sehingga tidak saling curiga antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat strategis dalam kaitannya dalam perencanaan pembangunan, karena Badan Permusyawaratan Desa erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan didalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD diluar pemerintah, akan tetapi BPD merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, posisi BPD dengan diberlakunya Undang-Undang ini justru semakin menguat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, untuk mensinkronkan apa yang menjadi tujuan perencanaan pembangunan di Desa hal ini untuk menjadi pedoman teknis untuk BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerja sama antara aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemampuan biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, untuk itu anggota BPD harus mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pengetahuan dan keterampilan seseorang terjun langsung dalam penyelenggara Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan system *check and balance* dalam Pemerintahan Desa. Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati. Dalam pengimpletasian fungsi BPD sebagai badan Legislatif Desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

Selama ini peran keaktifan Badan Permusyawaratan Desa dalam program pembangunan selalu tidak dihadiri oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa. Pihak BPD sendiri sering membicarakan pembahasan mengenai pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan serta kesehatan namun tidak dalam rapat Desa.

Masyarakat Desa Buangin merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintahan Desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang

semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu dari kewajiban Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.³

2.Faktor kinerja pendukung dan penghambat terciptanya pemerintahan yang baik

Dalam wawancara ini Andi Ikhsan selaku salah satu masyarakat Desa Buangin menambahkan faktor kinerja pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin adalah sebagai berikut:

Faktor kinerja pendukung tak lepas dari Sumber Daya Manusia (SDM), dimana Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Buangin, terkhusus aparat desa dari segi pendidikan sudah sangat mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan satu faktor kunci keberhasilan didalam pemerintahan Desa. Selain dari Sumber Daya Manusia faktor pendukung yang lain dalam mewujudkan Demokrasi Desa itu sendiri khususnya pemerintah Desa selaku pengelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus betul-betul berdasarkan dengan skala prioritas dalam pengelolaannya.

^{3 3} Bapak kepala Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 20 November 2018

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di Desa yang memiliki peran yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Selain itu juga kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam wujud demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam tata pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Jika dilihat, diamati tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalan potensi Desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan Desa bersama dengan kepala desa.

Kerusakan lingkungan menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem bagi masyarakat Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan masyarakat, melalui Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan aspirasi kepada pemerintah Desa.

Melalui kesepakatan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa pada beberapa Desa khususnya di lokasi bencana, telah melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun rakyat Desa mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya bencana.

Badan Permusyawaratan Desa dituntut lebih profesional dan lebih memahami system pemerintahan dan alur organisasi dalam Desa tersebut. Kerjasama adalah kunci keberhasilan, keikhlasan bekerja adalah kunci menuju kesuksesan, koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa berjalan lancar tanpa menemui kendala yang menghambat pembangunan Desa. Kendala yang biasanya dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi hanya sekitar 50% anggota yang ikut terlibat dalam rapat, kami mencoba musyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa adalah kurang berpartisipasi anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat yang telah diadakan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut sangat mempengaruhi hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak Badan Permusyawaratan Desa berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif dalam berdemokrasi.⁴

^{4 4} Bapak kepala Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tanggal 20 November 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Badan Permusyawaratan Desa juga turut berperan serta dalam meredam setiap masalah yang ada di desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Buangin sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawahkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Badan Permusyawaratan Desa juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk di desa, dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain:

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa. Dengan

demikian maka Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih kokrit dalam setiap peraturan-peraturan yang ada di desa. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang administrasi. Dukungan dan keikutsertaan warga masyarakat Desa Buangin dalam pelaksanaan pembangunan, baik partisipasi swadaya, swadana, maupun partisipasi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatannya potensi yang ada secara optimal.

Harapan dari RPJM-Des Desa Buangin ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam inplementasi pelaksanaan pembangunan di Desa tahun 2016. – 2021, yang selanjutnya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, yang dapat diperkaya dari hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSREMBANG) sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Adnan, M. Fachri. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Pada Era Demokratisasi, *Jurnal Demokrasi* Vol. IV No.1 Th. 2005.
- Amanulloh, Naeni. *Demokratisasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Depertemen agama RI. *Al-Hikmah Alqur'an dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro. 2010.
- Herningtyas, Maria. Peran badan perwakilan desa dalam penetapan peraturan desa di desa grogol kecamatan grogol kabupaten sukoharjo, *skripsi sarjan*, Surakarta: universitas sebelas maret 2006.
- Indra, J. Piliang. dkk (editor), *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
- Jamil, Gunawan, dkk (editor), *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.
- M, Alfian Alfian M, *Mahalnya Harga Demokrasi*, Jakarta: Intrans, 2001.
- Marwan, M. & Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Miskawati, Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu), *Skripsi Sarjan*, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014.
- Mokodongan, Frangki Adi Wijaya. Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow), *Skripsi Sarjana*, Manado: UNSRAT, 2010.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal MMH*, Jilid 43 No.3 Juli 2014.

Riduwan. *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabet., 2013.

Said, M. Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2005.

Save, Dagun, dkk, *Demokrasi Dalam Tajuk*, Jakarta: Institut Ecata – INPI Pact, 1997.

Siregar Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Wardoyo, Gondang Purwanto. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo), *Skripsi Sarjana*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010.

Wibowo, Dwi Arif , *Teori-Teori Demokrasi*, <https://dwiarifwibowo.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-demokrasi/>, (diakses pada 19 April 2018).

Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa, (diakses pada 19 April 2018).

Demokrasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, (diakses pada 19 April 2018).

Pemerintah Desa, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa, (diakses pada 19 April 2018).

Sumber Data, Buku Pedoman, Dokumentasi, Profil Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur

Andi Ikhsan, Masyarakat Desa Buangin, Wawancara, Tanggal 17 November 2018

Kepala Desa Buangin, Wawancara, Tanggal 20 November 2018

Dokumentasi



